

REFERENSI

No. 01/ref.PKA/VI/2020

**ALOKASI PENANAMAN MODAL NEGARA (PMN)
KEPADA BUMN BERDASARKAN TUJUAN PEMBERIAN
MELALUI APBN (PERIODE 2015-2020)**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN - SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ALOKASI PMN KEPADA BUMN BERDASARKAN TUJUAN PEMBERIAN MELALUI APBN (PERIODE 2015-2020)

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.
Rosalina Tineke Kusuma Wardhani, S.E.
Satrio Arga Effendi, S.E. *)

I. PERKEMBANGAN PMN PERIODE 2015-2020

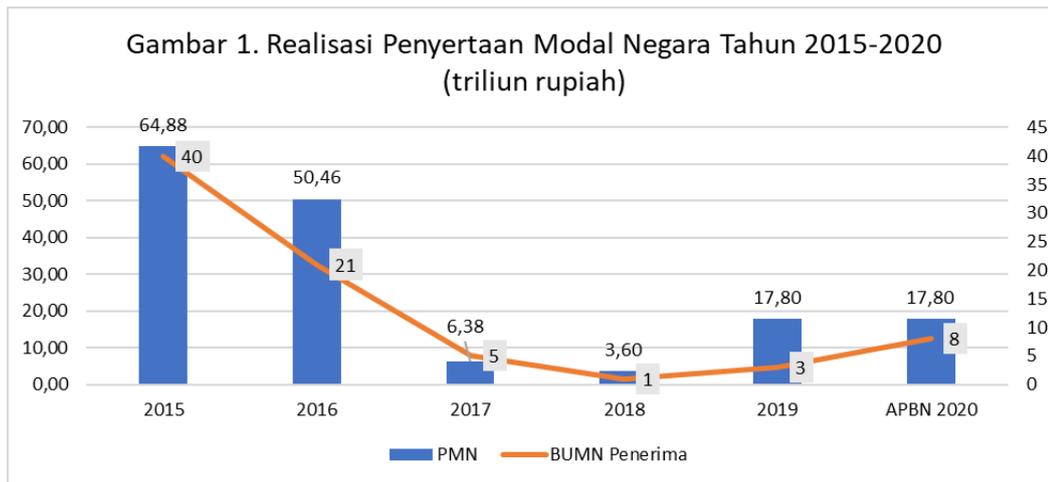
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Pemerintah dapat memberikan penyertaan modal negara untuk 3 hal, yaitu : (1) Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas; (2) Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik Negara; atau (3) Penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya telah terdapat saham milik Negara. Dalam PP yang sama, dijelaskan juga bahwa alokasi dana PMN berasal dari 3 sumber dana, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan, dan dari sumber lainnya (keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham). Sumber PMN yang berasal dari APBN meliputi kekayaan negara berupa :

- a. Dana segar
- b. Barang milik negara
- c. Piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas
- d. Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
- e. Aset negara lainnya

PMN yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah PMN yang berasal dari dana segar APBN. Dimana pemberian PMN yang bersumber dari dana segar APBN ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Dalam Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2020, Pemerintah menetapkan strategi pembiayaan anggaran yang efisien dan inovatif untuk mendukung program prioritas, antara lain melalui pembiayaan investasi yang memperhatikan *value for money* serta pembiayaan utang yang selektif dan produktif. Salah satu pembiayaan investasi jangka yang berorientasi pada penerimaan pembiayaan kembali adalah PMN terhadap BUMN. Selama 6 (enam) tahun terakhir, Pemerintah telah mengalokasikan PMN kepada BUMN sebesar Rp160,92 triliun (Gambar 1).

*) Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Sumber : LKPP dan Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

Secara umum tujuan utama pemberian PMN tersebut untuk mendukung program-program prioritas Nasional (Nawacita) yang meliputi (1) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas; (2) Pembangunan Maritim; (3) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (4) Pembangunan Industri Pertahanan dan Keamanan; (5) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional; (6) Kedaulatan Energi; dan (7) Pengembangan Industri Strategis. PMN yang diklasifikasikan ke dalam 7 program prioritas tersebut tercatat dalam Nota Keuangan APBN tahun 2015 dan 2016. Oleh karena itu, untuk PMN tahun 2015-2020 penulis mengklasifikasikan tujuan pemberian PMN berdasarkan klasifikasi 7 program prioritas tersebut.

Namun selain program prioritas di atas, Pemerintah juga memberikan PMN untuk tujuan lainnya, yaitu pemberian PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung pembiayaan perumahan. Untuk tujuan PMN ini, penulis mengklasifikasikannya menjadi PMN BUMN bidang Penyediaan KPR Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

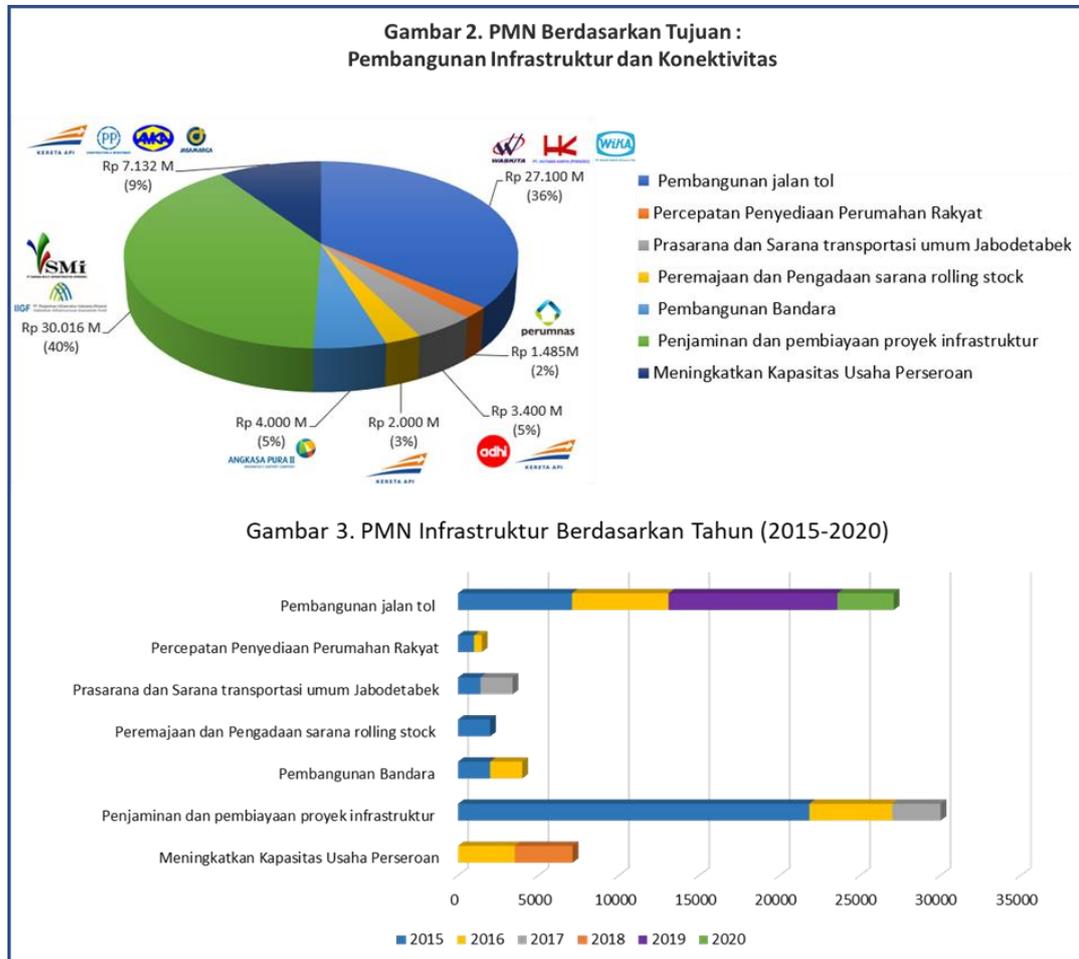
II. ALOKASI PMN BERDASARKAN PENGELOMPOKAN BUMN DAN TUJUAN

A. BUMN Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas

Total PMN yang diberikan kepada BUMN di bidang pembangunan infrastruktur dan konektivitas sepanjang tahun 2015-2020 sebesar Rp75.133 miliar. Alokasi PMN tersebut antara lain ditujukan untuk beberapa hal seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.

Pertama, untuk mendukung program percepatan pembangunan jalan tol, Pemerintah memberikan PMN kepada PT Utama Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita dengan total PMN periode 2015-2020 sebesar Rp27.100 miliar. **PT Utama Karya** mendapat 4 kali suntikan dana yaitu pada tahun 2015 (Rp3.600 miliar), tahun 2016 (Rp2.000 miliar), tahun 2019 (Rp10.500 miliar), dan tahun 2020 (Rp3.500 miliar) untuk pembangunan ruas tol Trans Sumatera (Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbangi Besar). **PT Wijaya Karya** mendapat 1 kali PMN yang diberikan pada tahun 2016 (Rp4.000 miliar) untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam melaksanakan proyek infrastruktur antara lain pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, Kawasan Industri Kuala Tanjung, serta Pembangunan Water Treatment Plant. Sementara **PT Waskita Karya** mendapatkan PMN pada tahun 2015 sebesar Rp3.500 miliar untuk mendukung penyelesaian jalan tol strategis yang terbengkalai dan pembangunan jalan tol baru, serta transmisi 500 KV wilayah Sumatera.

Kedua, PMN untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan rakyat diberikan kepada **Perum Perumnas** pada tahun 2015 (Rp1.000 miliar) dan tahun 2016 (Rp485 miliar) yang ditujukan untuk memperbaiki struktur modal perusahaan, meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, serta percepatan penyediaan *land bank* dan pembangunan rumah sederhana.



Sumber : Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

Ketiga, Di bidang transportasi umum, Pemerintah memberikan PMN kepada **PT Adhi Karya** sebesar Rp1.400 miliar pada tahun 2015, yang digunakan untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, serta membiayai pembangunan proyek monorel di Jakarta. Selanjutnya, di tahun yang berbeda **PT Kereta Api Indonesia (KAI)** juga mendapatkan PMN sebesar Rp2.000 miliar (2017) untuk mendukung sistem transportasi nasional, khususnya daerah Jabodebek. Pemerintah menugaskan PT KAI sebagai penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian LRT Jabodebek. Selain di Jabodebek, **PT KAI** mendapat PMN sebesar Rp2.000 miliar tepatnya di tahun 2015 untuk peremajaan dan pengadaan sarana (*rolling stock*) untuk Trans Sumatera, Jawa, dan Trans Kalimantan.

Keempat, Bentuk dukungan Pemerintah di bidang transportasi udara yaitu PMN kepada **PT Angkasa Pura II** sebesar Rp2.000 miliar (2015), untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka melanjutkan pembebasan lahan. PMN ini juga ditujukan untuk pembangunan 3 landasan pacu (*runway*) di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

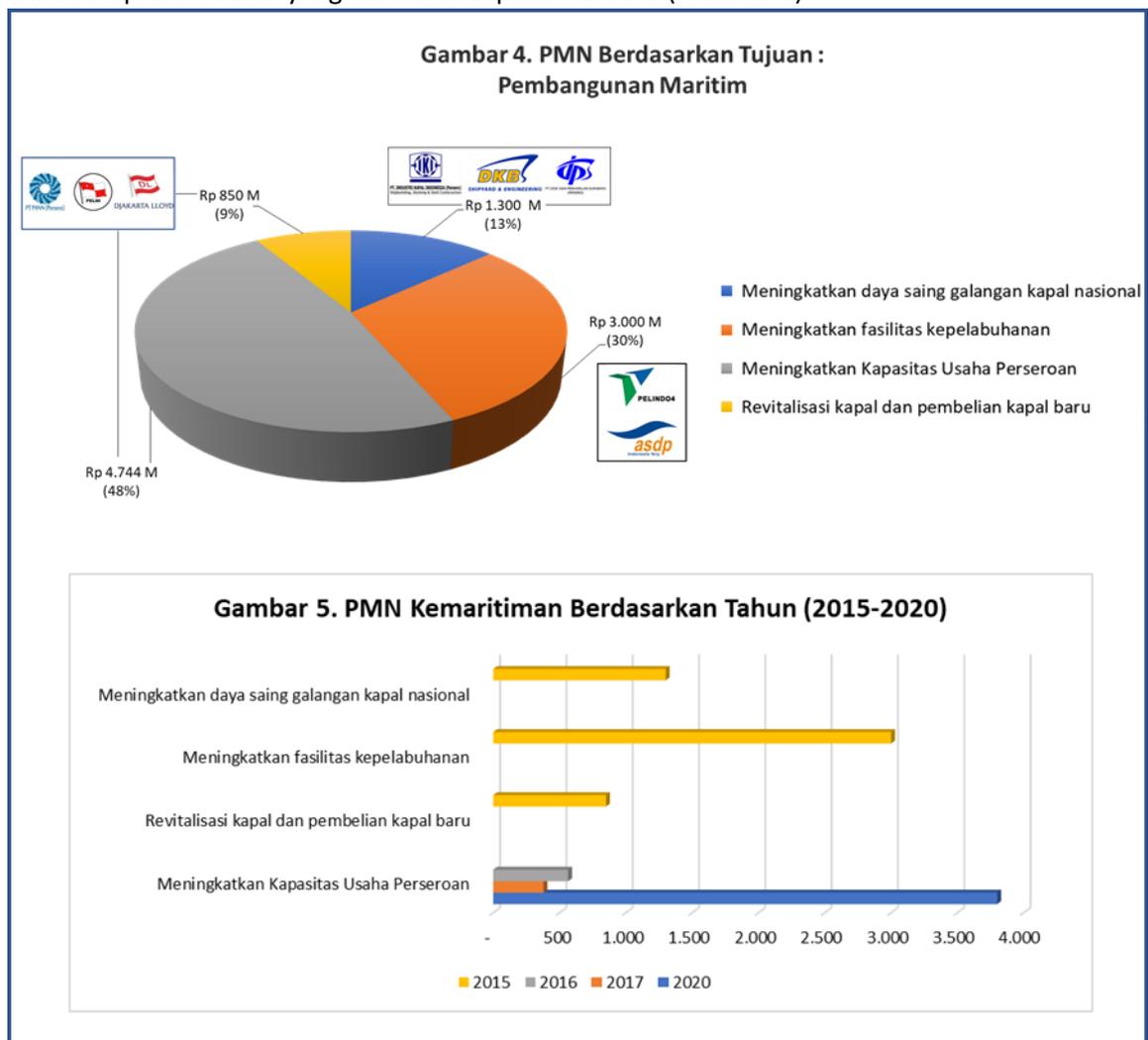
Selanjutnya, Sebagai upaya dukungan Pemerintah terhadap kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia, Pemerintah memberikan PMN untuk penjaminan dan pembiayaan Infrastruktur kepada **PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)** dan **PT Sarana**

Multi Infrastruktur (SMI) dengan alokasi terbesar dibandingkan dengan PMN tujuan lainnya, yaitu hingga Rp30 triliun (40 persen dari total PMN bidang Infrastruktur) selama periode 2015-2020. PT PII mendapatkan PMN sebesar Rp1.500 miliar (2015), Rp1.000 miliar (2016), dan Rp1.000 miliar (2017) yang ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dalam melakukan penjaminan di bidang infrastruktur. Sementara PMN untuk PT SMI sebesar Rp20.350 miliar (2015), Rp4.160 miliar (2016), dan Rp2.000 miliar (2017) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha perseroan di bidang pembiayaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta mendukung perseroan untuk melaksanakan kegiatan konsultasi (*advisory*) dan penyiapan proyek KPBU.

Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan PMN khusus untuk meningkatkan kapasitas usaha perseroan, seperti PMN kepada **PT Pembangunan Perumahan**, **PT Jasa Marga**, dan **PT Amarta Karya** sebesar Rp2.250 miliar, Rp1.250 miliar, dan Rp32 miliar di tahun 2016, serta PMN kepada **PT KAI** sebesar Rp3.600 miliar di tahun 2018.

B. BUMN Bidang Pembangunan Maritim

Dalam bidang pembangunan maritim, jumlah alokasi PMN sepanjang tahun 2015-2020 sebesar Rp9.894 miliar yang diberikan kepada 8 BUMN (**Gambar 4**).



Sumber : Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

Pertama, untuk meningkatkan daya saing galangan kapal Nasional, pemerintah memberikan PMN kepada **PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari** sebesar Rp900 miliar untuk penyelesaian galangan Batam, sehingga kapasitas galangan meningkat 6,8 kali lipat dan mampu membangun kapal berukuran 25.000 DWT, serta penambahan dok dengan kapasitas 50.000 DWT. **PT Dok dan Perkapalan Surabaya** juga mendapatkan alokasi Rp200 miliar untuk pengadaan *floating dock* sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan modernisasi peralatan kerja. **PT Industri Kapal Indonesia** juga mendapatkan alokasi sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan *airbag* kapasitas 4 x 6.500 DWT, *floating dock* 8.500 DWT, penambahan fasilitas penunjang galangan, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan modal kerja. Kedua, porsi PMN kemaritiman terbesar dalam periode 2015-2020 ditujukan untuk peningkatan fasilitas kepelabuhanan, dimana dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) mendapatkan total suntikan dana sebesar Rp3.000 miliar. **PT Pelindo IV** mendapatkan Rp2.000 miliar yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur kepelabuhanan di Indonesia Timur dalam rangka menekan disparitas harga barang dan menunjang kelancaran transportasi barang pada jalur poros maritim di Indonesia Timur. **PT ASDP** mendapatkan Rp1.000 miliar untuk pengembangan kapasitas dermaga pelabuhan penyeberangan Merak dan Bakauheni, serta penambahan armada guna memperlancar arus barang, penumpang, dan kendaraan dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya.

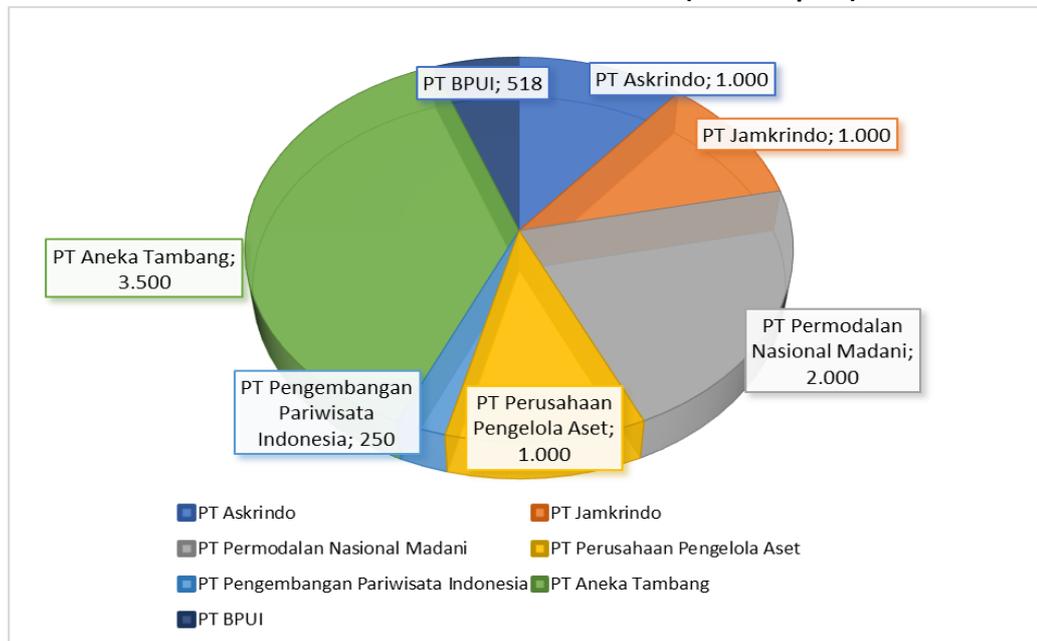
Selanjutnya dalam upaya pembangunan maritim, Pemerintah juga mendukung revitalisasi kapal dan pembelian kapal baru dengan memberikan PMN kepada PT Pelayaran Indonesia (Pelni) dan PT Djakarta Lloyd. Untuk **PT Pelni**, PMN sebesar Rp500 miliar diberikan untuk pembelian 6 unit kapal, diantaranya 2 unit kapal kontainer kapasitas 700 TEUs dan 4 unit kapal kontainer kapasitas 350 TEUs, serta ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah Indonesia Tengah dan Timur. Sementara **PT Djakarta Lloyd** mendapatkan PMN sebesar Rp350 miliar untuk revitalisasi beberapa kapal yang sudah rusak dan pembelian 1 kapal baru Handymax.

PMN yang diberikan kepada 7 BUMN tersebut diatas diberikan pada tahun 2015, dengan total sebesar Rp5.150 miliar. Kemudian di tahun berikutnya (2016), **PT Pelni** kembali mendapatkan PMN sebesar Rp565 miliar yang bersumber dari APBN 2016 melalui konversi utang pokok Subsidiary Loan Agreement PT Pelni kepada Negara, dimana PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan PT Pelni. Ditahun selanjutnya (2017), **PT Djakarta Lloyd** juga mendapatkan PMN sebesar Rp379 miliar untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dan menurunkan debt to equity ratio perusahaan yang berdampak pada peningkatan kemampuan perusahaan melakukan *leverage* untuk menambah modal kerja atau melakukan investasi. Untuk tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan dana PMN untuk diberikan kepada **PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN)** sebesar Rp3.800 miliar yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan memperbaiki rasio utang PT PANN, sehingga PT PANN dapat lebih berperan dalam pengembangan armada maritim nasional.

C. BUMN Bidang Pembangunan Kemandirian Ekonomi Nasional

Sepanjang tahun 2015-2020, alokasi PMN untuk bidang kemandirian ekonomi nasional sebesar Rp9.268 miliar kepada 7 BUMN. Secara umum alokasi ini ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit dan pendampingan UMKM, restrukturisasi revitalisasi BUMN, pengembangan kawasan Mandalika, serta pembangunan smelter.

**Gambar 6. PMN Berdasarkan Tujuan :
Kemandirian Ekonomi Nasional (miliar rupiah)**



Sumber : Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

Pada tahun 2015, alokasi PMN kepada **PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo)** dan **Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)** masing-masing sebesar Rp500 miliar, dengan tujuan untuk penjaminan penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada UMKM dan Koperasi. **PT Permodalan Nasional Madani** juga mendapat porsi PMN Rp1.000 miliar untuk meningkatkan modal kerja pembiayaan UMKM, memperluas layanan, serta meningkatkan kemampuan untuk membiayai program pemberdayaan kluster industri secara terpadu. Selanjutnya untuk tujuan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, pemerintah memberikan PMN sebesar Rp1.000 miliar kepada **PT Perusahaan Pengelola Aset**. Untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata Mandalika Lombok (Mandalika Resort), Pemerintah memberikan PMN kepada **PT Pengembangan Pariwisata Indonesia** sebesar Rp250 miliar. Alokasi PMN kepada PT Bahana Pembinaan Indonesia (PT BPUI) sebesar Rp250 miliar bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan. Kemudian, porsi terbesar dari PMN untuk Kemandirian Ekonomi Nasional diberikan kepada **PT Aneka Tambang** sebesar Rp3.500 miliar yang digunakan untuk pembangunan proyek feronikel di Halmahera Timur yang merupakan salah satu proyek MP3EI Koridor Ekonomi Papua dan Maluku, proyek Anoda Slime, dan proyek Smelter Grade Alumina (SGA) Mempawah.

Pada tahun 2016, alokasi PMN diberikan kepada **PT Askrindo** dan **Perum Jamkrindo** dengan jumlah masing-masing sebesar Rp500 miliar. Secara garis besar, alokasi ini ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh UMKM.

Pada tahun 2020, alokasi PMN secara umum bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan yang diberikan kepada **PT BPUI** sebesar Rp268 miliar untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan operasional perseroan untuk mencapai target

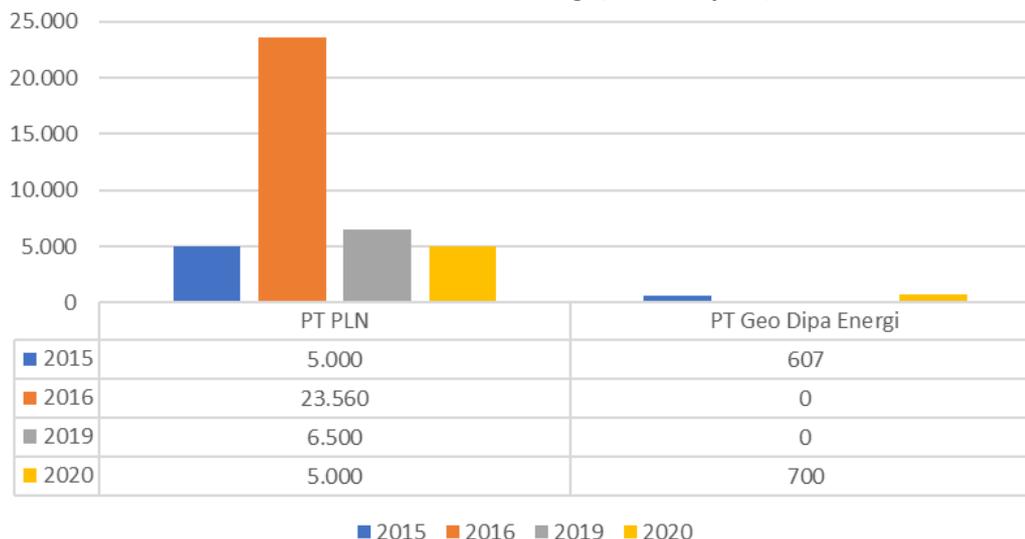
pertumbuhan jumlah UMKM menjadi 75.581 pasangan usaha pada tahun 2020. Selanjutnya PMN kepada **PT Permodalan Nasional Madani** sebesar Rp1.000 miliar ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan perseroan dalam melakukan pemberdayaan usaha para perempuan prasejahtera melalui Program Mekaar, akselerasi nasabah program Mekaar melalui program Mekaar Naik Kelas sehingga menjadi nasabah yang memiliki akses pembiayaan yang mumpuni, dan memperluas jaringan layanan program Mekaar.

D. BUMN Bidang Pembangunan Kedaulatan Energi

Untuk mendukung program pemerintah yang terkait dengan kedaulatan energi, Pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp41.367 miliar yang diberikan kepada 2 BUMN. Secara umum, alokasi ini ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendanaan dalam pembiayaan infrastruktur yang terkait dengan ketenagalistrikan.

Pada tahun 2015, alokasi PMN diberikan kepada **PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)** sebesar Rp5.000 miliar yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam mega proyek 35.000 MW. Selain itu, PMN kepada **PT Geo Dipa Energi** sebesar Rp607 miliar untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik dari 115 MW menjadi 330 MW, dan juga digunakan untuk pengembangan PLTP Dieng 1, PLTP Dieng 2, PLTP Dieng 3, PLTP Patuha 1, PLTP Patuha 2, dan PLTP Patuha 3.

**Gambar 7. PMN Berdasarkan Tujuan :
Kedaulatan Energi (miliar rupiah)**



Sumber : Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

Pada tahun 2016, jumlah alokasi PMN kepada **PT PLN** sebesar Rp23.560 miliar yang diberikan kepada PT PLN sebesar Rp23.560 miliar. Penggunaan PMN ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan dalam rangka mendukung pendanaan proyek 35.000 MW sampai dengan tahun 2019, meningkatkan kemampuan pendanaan perseroan untuk membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan sebagai salah satu daya dorong terlaksananya program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita.

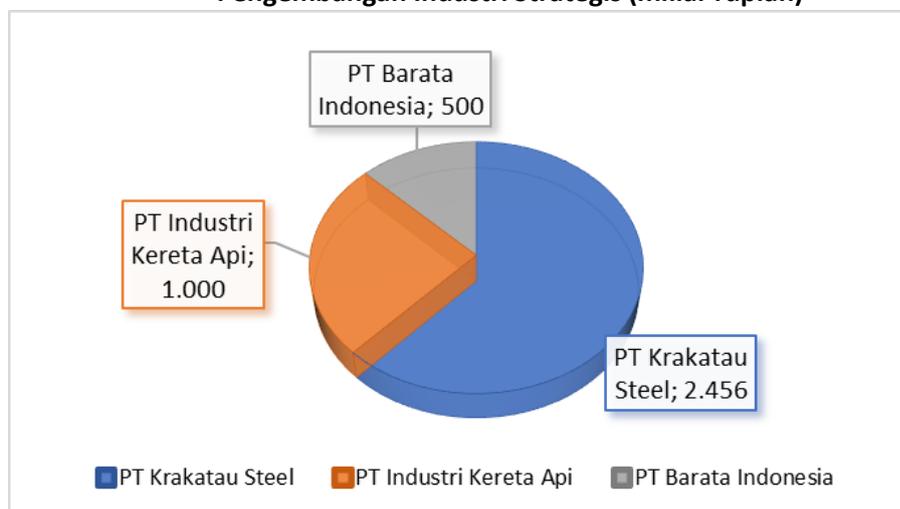
Pada tahun 2019, alokasi PMN kepada **PT PLN** sebesar Rp6.500 miliar yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha PT PLN dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Adapun rencana peruntukan dana PMN PT PLN dalam APBN tahun 2019 akan dialokasikan untuk Program Listrik pedesaan, transmisi, dan gardu induk guna mencapai target rasio elektrifikasi sekitar 97 persen tahun 2019.

Pada tahun 2020, PMN diberikan kepada **PT PLN** sebesar Rp5.000 miliar, bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha PT PLN dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan guna mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020. Selain itu, alokasi PMN juga diberikan kepada **PT Geo Dipa Energi** sebesar Rp700 miliar yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha PT Geo Dipa Energi dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT Geo Dipa Energi untuk membiayai pengembangan panas bumi di area WKP yang dimiliki. Output dari penambahan PMN ini adalah untuk memenuhi porsi ekuitas proyek pengembangan PLTP Dieng 2 dan PLTP Patuha 2 yang direncanakan akan beroperasi pada 2022.

E. BUMN Bidang Pengembangan Industri Strategis

Dalam bidang pengembangan industri strategis, jumlah alokasi PMN sepanjang tahun 2015-2020 sebesar Rp3.956,5 miliar yang diberikan kepada 3 BUMN. Secara umum PMN ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan meningkatkan kapasitas usaha perseroan.

**Gambar 8. PMN Berdasarkan Tujuan :
Pengembangan Industri Strategis (miliar rupiah)**



Sumber : Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

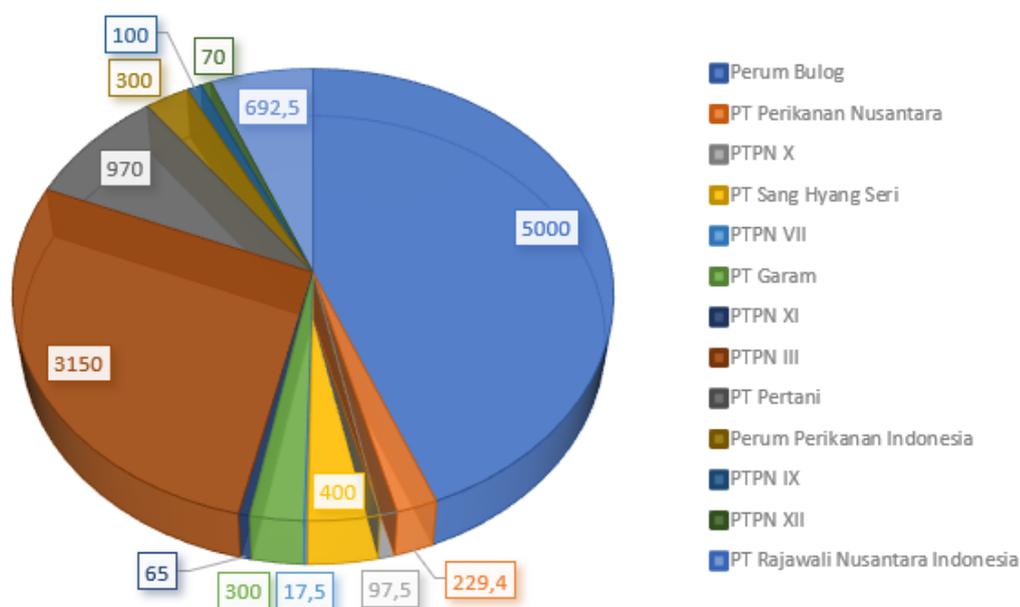
Pada tahun 2016, jumlah PMN sebesar Rp3.957 miliar yang digunakan untuk mendukung program pengembangan industri strategis antara lain untuk pengembangan peralatan dan mesin agro industri, pengembangan industri manufaktur kereta api, dan pengembangan industri baja. Perusahaan dengan alokasi PMN terbesar yaitu **PT Krakatau Steel** sebesar Rp2.456,5 miliar, ditujukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan *Hot Strip Mill* (HSM) #2 dan pembangunan pembangkit listrik serta pemenuhan legalitas kapitalisasi laba tahun 2010 yang telah dilaporkan sebagai dividen saham oleh PT Krakatau Steel. Selain itu, **PT Industri Kereta Api** sebesar Rp1.000 miliar untuk memperbaiki struktur

permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Industri Kereta Api dalam rangka mendorong program pengembangan industri strategis melalui investasi dan revitalisasi fasilitas produksi, pembiayaan untuk proyek kereta berpengerak, serta pembangunan pabrik baru. Adapun porsi PMN terkecil yaitu **PT Barata Indonesia** sebesar Rp500 miliar, yang bertujuan untuk pembangunan pabrik pusat penempaan (*forging*) dan permesinan (*machining center*) serta pengembangan pabrik industri agro dan pabrik pengecoran.

F. BUMN Bidang Pembangunan Kedaulatan Pangan

Total PMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan selama kurun waktu 2015-2020 sebesar Rp11.391,9 miliar. PMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional. Terdapat dua belas BUMN yang mendapatkan PMN, yaitu:

Gambar 9. PMN Berdasarkan Tujuan : Kedaulatan Pangan (miliar rupiah)



Sumber : Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

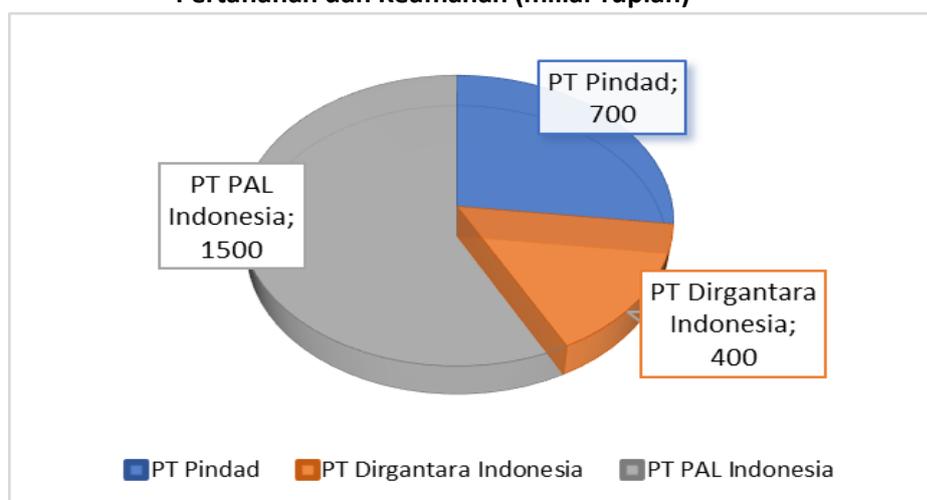
PT Garam menerima PMN sebesar Rp300 miliar (2015) untuk peningkatan produksi garam dalam negeri dan penyerapan garam rakyat. **PT Pertani (Persero)** mendapat Rp470 miliar (2015) untuk percepatan Swasembada Beras dan Rp500 miliar (2016) untuk meningkatkan kuantitas produk benih padi, jagung, dan kedelai serta meningkatkan kuantitas gabah dan beras. **PT Sang Hyang Seri (Persero)** menerima Rp400 miliar (2015); **Perum Perikanan Indonesia** menerima Rp300 miliar (2015); dan **PT Perikanan Nusantara** menerima Rp200 miliar (2015) dan Rp29,4 miliar (2016), dimana secara umum tujuan ketiga BUMN adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha. Untuk tujuan spesifik pemberian PMN tersebut, Perum Bulog mendapat Rp3.000 miliar (2015) dan Rp2.000 miliar (2016) untuk stabilisasi harga pangan, percepatan penyerapan gabah/beras,serta meningkatan kapasitas usaha. **PTPN III** mendapat Rp3.150 miliar (2015); **PTPN VII** mendapat Rp17,5 miliar (2015); **PTPN IX** menerima Rp100 miliar (2015); **PTPN X** menerima Rp97,5 miliar (2015); **PTPN XI** menerima Rp65 miliar (2015); dan **PTPN XII** menerima Rp70 miliar (2015), yang digunakan untuk memperbaiki struktur pemodaln,

pembangunan pabrik gula, serta optimalisasi kapasitas produksi. **PT Rajawali Nusantara Indonesia** mendapat Rp692,5 miliar (2016) untuk memperbaiki struktur modal.

G. BUMN Bidang Pengembangan Pertahanan dan Keamanan

Total PMN untuk mendukung program industri pertahanan dan keamanan selama kurun waktu 2015-2020 hanya diberikan di tahun 2015 sebesar Rp2.600 miliar. Pemberian PMN ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

**Gambar 10. PMN Berdasarkan Tujuan :
Pertahanan dan Keamanan (miliar rupiah)**



Sumber : Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

PT Dirgantara Indonesia (Persero) mendapat PMN sebesar Rp400 miliar untuk meningkatkan modal kerja guna menambah leverage fasilitas bank, investasi dukungan maritim dan fasilitas produksi. **PT Pindad (Persero)** menerima Rp700 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan SDM. Alokasi kepada **PT PAL Indonesia** sebesar Rp1.500 miliar ditujukan untuk pembangunan fasilitas, pengembangan SDM, serta pengadaan peralatan pembuatan kapal selam.

H. BUMN Bidang Penyediaan KPR Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Total PMN untuk mendukung program penyediaan KPR bagi MBR selama kurun waktu 2015-2020 sebesar Rp6.300 miliar yang diberikan kepada **PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)**. PMN ini diberikan sebanyak lima kali yaitu Rp1.000 miliar (2015), Rp1.000 (2016), Rp1.000 miliar (2017), Rp800 miliar (2019), dan Rp2.500 miliar (2020) yang bertujuan untuk mendukung kesinambungan pembiayaan perumahan melalui penyediaan pendanaan kepada penyalur KPR FLPP.

III. KESIMPULAN

Secara umum tujuan utama pemberian PMN untuk mendukung program-program prioritas Nasional (Nawacita). Adapun total alokasi PMN berdasarkan pengelompokan BUMN dan tujuan dari tahun 2015-2020 adalah (1) BUMN Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp75.133 miliar; (2) BUMN Bidang Pembangunan Maritim Rp9.894 miliar; (3) BUMN Bidang Pembangunan Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp9.268 miliar; (4) BUMN Bidang Pembangunan Kedaulatan Energi sebesar Rp41.367 miliar; (5) BUMN Bidang Pengembangan Industri Strategis sebesar Rp3.956,5 miliar; (6) BUMN Bidang Pembangunan Kedaulatan Pangan sebesar Rp11.391,9 miliar; (7) BUMN Bidang Pengembangan Pertahanan dan Keamanan sebesar Rp2.600 miliar; dan (8) BUMN Bidang Penyediaan KPR Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebesar Rp6.300 miliar.

Daftar Pustaka

Nota Keuangan APBN/APBNP Tahun Anggaran 2015-2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015-2020.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id